

LAPORAN KONTRAK

KARTU PENGAWASAN KONTRAK

SATKER

664323

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Per Tanggal : 26-May-2026

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN

Informasi Supplier

NRS : 997711
SPAN Nama Supplier : PT. SATRIA PIRANTI PERKASA_0018049601048000
Nama Supplier : PT. SATRIA PIRANTI PERKASA
NPWP : 0018049601048000
Nama Site : 2_14330

Informasi Bank/Pihak Ketiga

Nama Pihak Ketiga : PT. SATRIA PIRANTI PERKASA
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA
No rekening : XXXXXXXXXX
Nama Pemilik Rekening : SATRIA PIRANTI PERKASA PT.
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Tahunan : A/018.26003290/0/0
Nilai Kontrak Tahunan : 940,749,935.00
Satker : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
No. Kontrak : EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3
No. RFC : 664323|2026|EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3|0|3399848
Tanggal Kontrak : 30-Apr-2026
Tanggal Mulai Kontrak : 30-Apr-2026
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi Pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-059.01.1.664323/2026;25-Nov-2025; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : 1% (satu per mil) per hari maksimum 5% dari nilai kontrak
Keterangan : Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026

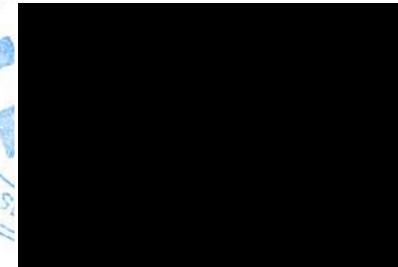
Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2026
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang : Rupiah
Tipe Kurs : -
Nilai Kurs : 0.00

No.	Keterangan	Kategori	Nilai	Uang Muka		Retensi		Termin	Keterangan	Jadwal	Nilai Termin	No SPP	No SPM	Jenis SPP	Pengembalian Uang Muka	Potongan Retensi	COA
				%	Nilai	%	Nilai										
1	Sekaligus	RM	940,749,935.00	0.0	0.00	0.0	0.00	1	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026	26 Mei 2026	940,749,935.00	00141T	00141A	Kontraktual	0.00	0.00	664323.018.522141.05901WA.4492EBA.A000000001.00000.1.0151.2.0000000.000000

No.	Nomor SPM	Tanggal SPM	Nomor SP2D	Tanggal SP2D	Nilai SPM (Kotor)	Potongan							Jumlah Potongan	Nilai SP2D (Bersih)
						PPN	PPn.BM	PPH	Potongan Lainnya	Denda	Retensi	Potongan UM		

Total Uang Muka	0.00	Nilai Kontrak Tahunan	940,749,935.00	Total Pembayaran	0.00
Total Pengembalian UM	0.00	Total Realisasi	0.00	Total Potongan	0.00
Sisa Uang Muka	0.00	Total Yang Belum terealisasi	940,749,935.00	Total Pembayaran	0.00

Pejabat Pembuat Komitmen



RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 5/26/26 10:13 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

664323

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

INFORMASI KONTRAK TAHUNAN HEADER

Informasi Supplier

NRS : 997711
SPAN Nama Supplier : PT. SATRIA PIRANTI PERKASA_0018049601048000
Nama Supplier : PT. SATRIA PIRANTI PERKASA
NPWP : 0018049601048000
Nama Site : 2_14330

Informasi Bank

Nama Pihak Ketiga : PT. SATRIA PIRANTI PERKASA
Nama Bank : BANK CENTRAL ASIA
No rekening : XXXXXXXXXX
Nama Pemilik Rekening : SATRIA PIRANTI PERKASA PT.
Mata Uang : Rupiah

Tipe Komitmen : Kontrak
CAN Annual Year : A/018.26003290/0/0
CAN Multi Year :
Nilai Annual Year : 940.749.935,00
Satker : 664323 KOMISI PENYIARAN INDONESIA
No. Kontrak : EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3
No. RFC : 664323|2026|EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3|0|3399848
Tanggal Kontrak : 30-Apr-2026
Tanggal Mulai Kontrak : 30-Apr-2026
Jangka Waktu Pemeliharaan : 0
Uang Muka :
Porsi pembayaran LOAN/GOI : 0/100
Catatan Tambahan : DIPA-059.01.1.664323/2026;25-Nov-2025; ;
No. Addendum :
Ketentuan Sanksi : 1% (satu per mil) per hari maksimum 5% dari nilai kontrak

Tanggal Selesai Kontrak : 31-Dec-2026
Tanggal Addendum :
Kategori PHLN :
Mata Uang SLA : Rupiah

Keterangan : Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026

RESUME KONTRAK

Informasi Laporan

Tanggal & Jam : 5/26/26 10:13 AM

RESUME KONTRAK TAHUNAN

SATKER

664323

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Bank/Asuransi Penjamin UM	:	Cara pembayaran	:	Sekaligus
Tanggal Jaminan	:	Cara Pengembalian UM	:	
Masa Berlaku	:	Cara Pemotongan Retensi	:	
Nomor Surat Jaminan UM	:	Uang Muka	:	
Tanggal Mulai	:			
Tanggal Berakhirnya	:			
Bank/Asuransi Penjamin AT	:			
Tanggal Jaminan	:			
Masa Berlaku	:			
Nomor Surat Jaminan AT	:			
Tanggal Mulai AT	:			
Tanggal Berakhirnya	:			

KOTA JAKARTA PUSAT, 26 Mei 2026
Pejabat Pembuat Komitmen



JADWAL
PENGADAAN SEWA KENDARAAN DINAS JABATAN SEKRETARIS KPI BULAN MEI S.D. DESEMBER 2026
DAN KOMISIONER KPI PUSAT BULAN JUNI S.D. DESEMBER 2026
(via e-Purchasing)

NO	TANGGAL	NOMOR SURAT	URAIAN	KETERANGAN
1			Nota Dinas / TOR	
2	23 April 2026	55/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPK/04/2026	Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi Harga	
3	30 April 2026	55/SETKPI.31/UP.01.04/SPPBJ/PPK/04/2026	Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	
4	30 April 2026	EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3	Surat Pesanan (e-Purchasing)	
5	04 Mei 2026	55/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/05/2026	Berita Acara Serah Terima I (1 Unit)	
6	25 Mei 2026	55/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/05/2026	Berita Acara Serah Terima II (9 Unit)	
7	31 Desember 2026	55/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/12/2026	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP)	
8	26 Mei 2026		Kuitansi	Rp940.749.935,-
9	26 Mei 2026	55/SETKPI.31/UP.01.04/BAP/PPK/05/2026	Berita Acara Pembayaran	
10	27 Mei 2026	55/SETKPI.31/UP.01.04/SPTB/PPK/05/2026	SPTB	
11			Surat Permintaan Pembayaran (SPP)	
12			Surat Perintah Membayar (SPM)	

RESUME KONTRAK

Untuk kegiatan yang dananya berasal dari Rupiah Murni (RM)

- 1 Nomor dan tanggal DIPA : SP DIPA-059.01.1.664323/2026 tanggal 1 Desember 2025
- 2 Kode Kegiatan/Output/Akun : 4492.EBA.994.002.C.522141
- 3 Nomor dan tanggal Perjanjian/Kontrak : EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3 tanggal 30 April 2026
- 4 Nama penyedia : PT. Satria Piranti Perkasa
- 5 Nama penandatangan : [REDACTED]
- 6 Jabatan penandatangan : Direktur
- 7 Alamat penyedia : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330.
- 8 Nilai Surat Pesanan/Kontrak : Rp940.749.935,-
- 9 Uraian dan volume pekerjaan : Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026
- 10 NPWP : [REDACTED]
- 11 Nomor rekening : [REDACTED]
- 12 Nama bank : [REDACTED]
- 13 Nama sesuai rekening : [REDACTED]
- 14 Cara pembayaran : Sekaligus
- 15 Nilai pembayaran bulanan : -
- 16 Jangka waktu pelaksanaan : 246 hari kalender
- 17 Nomor dan tanggal BAST I (1 Unit) : 55/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/05/2026 tanggal 04 Mei 2026
- 18 Nomor dan tanggal BAST II (9 unit) : 55/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/05/2026 tanggal 25 Mei 2026
- 19 Nomor dan tanggal BAPP : 55/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/12/2026 tanggal 31 Desember 2026
- 20 Nomor dan Tanggal BAP : 55/SETKPI.31/UP.01.04/BAP/PPK/05/2026 tanggal 26 Mei 2026
- 21 Jangka waktu pemeliharaan : -
- 22 Ketentuan sanksi : -
- 23 Surel admin : [REDACTED]
- 24 Kontak Perusahaan/admin : [REDACTED]

Catatan:

Apabila terjadi addendum kontrak data kontrak agar disesuaikan dengan perubahan


a.n, Kuasa Pengguna Anggaran
Pejabat Pembuat Komitmen

Nilai Bruto	:	Rp	940,749,935
DPP	:	Rp	847,522,464
PPN (11%)	:	Rp	93,227,471
PPh 23 (2%)	:	Rp	16,950,449
Pembayaran bersih	:	Rp	830,572,015

Terima kasih Anda telah mendukung pelayanan kami dengan tidak memberikan sesuatu imbalan berupa apapun kepada petugas layanan kami



KOMDIGI

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

BERITA ACARA EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Nomor : 55/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPK/04/2026

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh tiga bulan April tahun dua ribu dua puluh enam, bertempat di kantor Komisi Penyiaran Indonesia, Jalan Ir. H. Juanda No.36 Jakarta Pusat, kami yang bertanda tangan di bawah ini Pejabat Pembuat Komitmen yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 24 Tahun 2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2026 telah mengadakan Evaluasi dan Penilaian atas penawaran harga Pelaksanaan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026.

Evaluasi dan penilaian penawaran harga dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 dan Pelaksana Penyedia barang/jasa dengan rincian sebagai berikut:

1. Hasil-hasil dari rapat ini diantaranya:

a. Penawaran harga yang disampaikan oleh

Nama PT : PT. Satria Piranti Perkasa

Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330.

NPWP :

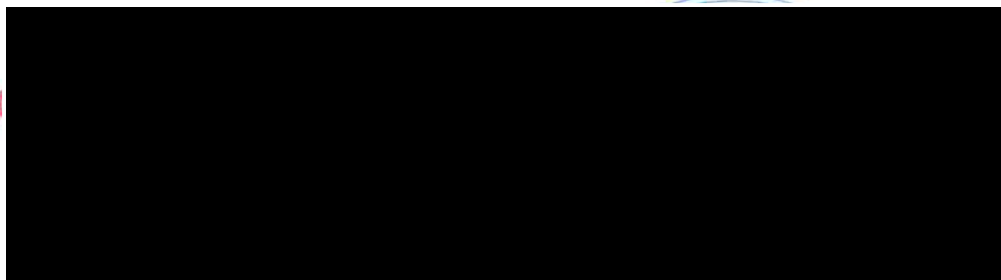
Harga Penawaran : Rp940.750.005,-

b. Setelah pejabat pengadaan melakukan evaluasi teknis dan penilaian kewajaran harga dengan pertimbangan bahwa:

- 1) Penawaran secara administratif dan teknis dapat dipertanggungjawabkan
- 2) Perhitungan harga yang ditawarkan dapat dipertanggungjawabkan
- 3) Telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin produksi dalam negeri
- 4) Selanjutnya atas penawaran tersebut setelah dilakukan klarifikasi dan negosiasi harga dan diperoleh kesepakatan harga sebesar Rp940.749.935,- (sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

Demikian berita acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk melengkapi persyaratan pengadaan barang/jasa dan dipergunakan seperlunya.

⑤



SEKRETARIAT K

LAMPIRAN

Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Harga

Nomor : 55/SETKPI.31/UP.01.04/BAEKN/PPK/04/2026

Tanggal : Jakarta, 23 April 2026

EVALUASI KLARIFIKASI DAN NEGOSIASI TEKNIS DAN HARGA

Penawaran:

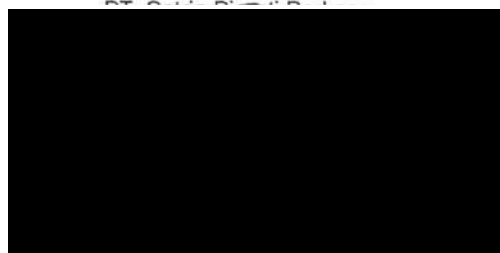
No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Masa sewa	Satuan	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah Harga
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026							
1	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2026 BULANAN CVT Hybrid	9	unit	7	Bulan	11,936,937	752,027,031
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2025 BULANAN CVT Hybrid	1	unit	8	Bulan	11,936,937	95,495,496
Jumlah sebelum pajak							847,522,527
PPN							93,227,478
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	Rp 940,750,005
sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu lima rupiah							

Menjadi:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Masa sewa	Satuan	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah Harga
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026							
1	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2026 BULANAN CVT Hybrid	9	unit	7	Bulan	11,936,936	752,026,968
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2025 BULANAN CVT Hybrid	1	unit	8	Bulan	11,936,937	95,495,496
Jumlah sebelum pajak							847,522,464
PPN							93,227,471
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	Rp 940,749,935
sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah							

Tanda tangan

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia





**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

Nomor : 55/SETKPI.31/UP.01.04/SPPBJ/PPK/04/2026
Lampiran : --
Perihal : Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Pengadaan
Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris
KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan
Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d.
Desember 2026

Jakarta, 30 April 2026

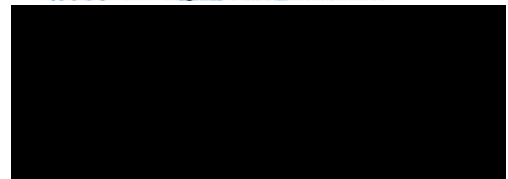
Kepada Yth.
Direktur PT. Satria Piranti Perkasa
Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011,
Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14330.

Dengan ini kami beritahukan sehubungan dengan hasil negosiasi melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik tentang Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026 dengan nilai total penawaran awal sebesar Rp940.750.005,- dan terkoreksi setelah negosiasi teknis dan harga menjadi Rp940.749.935,- kami nyatakan diterima/disetujui.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ. Kegagalan Saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran Saudara, akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025.

Segala sesuatunya yang berhubungan dengan pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini akan dituangkan dalam Surat Pesanan. Surat Penunjukan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia



Tembusan Yth.:

1. KPA komisi Penyiaran Indonesia
2. Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
3. Arsip

PAKTA INTEGRITAS

Kami yang bertanda tangan dibawah ini dalam rangka Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026, dengan ini menyatakan:

1. Tidak akan melakukan praktek KKN.
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini.
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan dan profesional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan /kegiatan ini.
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 April 2026

1 Pejabat Pembuat Komitmen
Komisi Penyiaran Indonesia

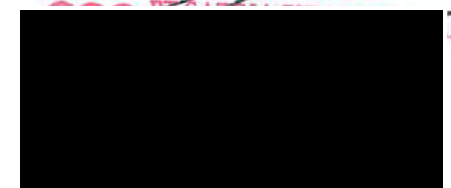
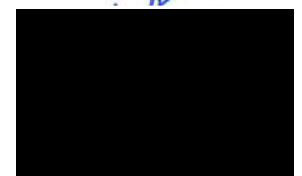
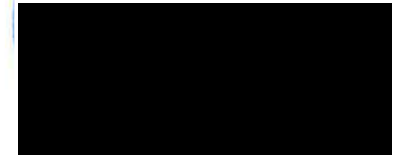
:

2 Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Komisi Penyiaran Indonesia

:

3 Direktur
PT. Satria Piranti Perkasa

:



ASA

Surat Pesanan	Komisi Penyiaran Indonesia						
	EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3 tanggal 30 April 2026.						
Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : [REDACTED] Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen Alamat Kantor : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120. selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA selaku Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 24 Tahun 2026 tanggal 12 Januari 2026 tentang Pejabat Perbendaharaan di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Digital Tahun Anggaran 2026; Nama : [REDACTED] Jabatan : [REDACTED] Alamat Kantor : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330. Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa, PIHAK KEDUA akan mengirimkan barang dan atau melakukan jasa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:							
Rincian Barang/Pekerjaan:							
No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Masa sewa	Satuan	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah Harga
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026							
1	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2026 BULANAN	9	unit	7	Bulan	11,936,936	752,026,968
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2025 BULANAN	1	unit	8	Bulan	11,936,937	95,495,496
Jumlah sebelum pajak							847,522,464
PPN							93,227,471
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	Rp 940,749,935
sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah							
SYARAT DAN KETENTUAN: 1. Hak dan Kewajiban A. Penyedia (PIHAK KEDUA) 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang dan/atau jasa sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini. 2) Penyedia/Pihak Kedua memiliki kewajiban: a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik; b. tidak menjual barang/jasa melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; c. mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini. Selambat-lambatnya pada tanggal 04 Mei 2026 untuk tipe Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT Hybrid Modelista VIN 2025, dan tanggal 25 Mei 2026 untuk tipe Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT Hybrid Modelista VIN 2025; d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang/jasa yang dipesan; e. melakukan pekerjaan sesuai spesifikasi dalam SP ini selama masa kontrak dengan PIHAK PERTAMA;							

- f. mengganti barang setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - g. memberikan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - h. memberikan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
- B. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian (PIHAK PERTAMA)**
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki hak:
 - a. menerima barang/jasa dari Penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini;
 - b. mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas jasa yang dipesan;
 - c. mendapatkan penggantian barang, dalam hal:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 - d. mendapatkan layanan tambahan yang diperjanjikan seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada);
 - e. mendapatkan layanan purna jual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.
 - 2) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian memiliki kewajiban:
 - a. melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini dengan memperhatikan performa layanan selama masa kontrak;
 - b. memeriksa kualitas dan kuantitas barang dan atau jasa sesuai dengan spesifikasi yang disepakati; dan
 - c. memastikan layanan tambahan telah dilaksanakan oleh penyedia seperti instalasi, testing, dan pelatihan (apabila ada).
2. Waktu Pengiriman Barang dan/atau Pelaksanaan Jasa
Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 25 Mei 2026.
 3. Alamat Pengiriman Barang
Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut: Kantor KPI Pusat Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.
 4. Tanggal Barang Diterima
Barang diterima paling lambat pada hari Senin tanggal 25 Mei 2026.
 5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
 - b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 - barang rusak akibat cacat produksi;
 - barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 - barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
 Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang/jasa dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang/jasa tersebut.
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
 - d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
 - e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja.
 6. Harga
 - a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
 - b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman saat semua unit pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuransi selama masa sewa, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
 - c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.
 7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Instansi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP;
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan masa langganan dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

11. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

12. Pembayaran

- 1) pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 - a. penyedia telah mengajukan tagihan;
 - b. pembayaran dilakukan secara Sekaligus, adapun total nilai pembayaran sesuai kontrak sebesar Rp940.749.935,- (sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah.);
 - c. Pembayaran atas nama SATRIA PIRANTI PERKASA pada BCA dengan nomor rekening: 4860168567 dan NPWP: 01.804.960.1-048.000 setelah barang pekerjaan selesai atau diserahkan oleh Pihak Kedua kepada PIHAK PERTAMA;
 - d. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak;
 - e. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang/jasa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah;

- f. Biaya yang timbul akibat pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam Surat Pesanan ini dibebankan pada DIPA Komisi Penyiaran Indonesia Tahun Anggaran 2026 dengan Nomor SP DIPA-059.01.1.664323/2026 tanggal 1 Desember 2025, Kegiatan/Output/MAK 4492.EBA.994.002.C.522141

13. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
- 1) Tidak menanggapi pesanan barang/jasa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) menjual jasa melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
- 1) peringatan tertulis;
 - 2) denda; dan
 - 3) pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi
Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

14. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
- 1) Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:
 - kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
- 1) Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 - 2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

15. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

16. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal menugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.

e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

17. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

18. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

19. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan/berakhirnya masa kontrak pada tanggal 31 Desember 2026

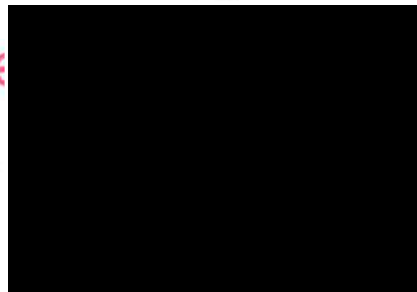
Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama Komisi Penyiaran
Indonesia, selaku **PIHAK PERTAMA**



Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa,
selaku Distributor/Penyedia/**PIHAK KEDUA**



1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. 2. Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. 3. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 4. Lokasi penelitian adalah di kelas di salah satu sekolah dasar di Jakarta. 5. Waktu penelitian adalah selama satu semester. 6. Instrumen penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 7. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 8. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 9. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan metode. 10. Etika penelitian telah dilewatkan oleh Komisi Etik Penelitian Universitas.	1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. 2. Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. 3. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 4. Lokasi penelitian adalah di kelas di salah satu sekolah dasar di Jakarta. 5. Waktu penelitian adalah selama satu semester. 6. Instrumen penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 7. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 8. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 9. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan metode. 10. Etika penelitian telah dilewatkan oleh Komisi Etik Penelitian Universitas.
1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. 2. Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. 3. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 4. Lokasi penelitian adalah di kelas di salah satu sekolah dasar di Jakarta. 5. Waktu penelitian adalah selama satu semester. 6. Instrumen penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 7. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 8. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 9. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan metode. 10. Etika penelitian telah dilewatkan oleh Komisi Etik Penelitian Universitas.	1. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. 2. Manfaat penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembelajaran di kelas. 3. Metode penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. 4. Lokasi penelitian adalah di kelas di salah satu sekolah dasar di Jakarta. 5. Waktu penelitian adalah selama satu semester. 6. Instrumen penelitian adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. 7. Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. 8. Teknik analisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 9. Validasi data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan metode. 10. Etika penelitian telah dilewatkan oleh Komisi Etik Penelitian Universitas.

No. Surat Pesanan : EP-01KPWNMSW0J1DPS314R6HJ7YZ3
 Tanggal Surat Pesanan : 30 Apr 2025, 16:16:43 WIB

Pemesan

KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Kementerian Komunikasi dan Digital

Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
 Jabatan Penanggung Jawab : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
 Divisi / Unit Kerja : Bidang Keuangan
 NPWP Pemesan : [REDACTED]
 Alamat Pemesan : Jl. Ir. H. Juanda No.36, Rt.7/rw.2, Kb. Klp.,
 Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat

Penyedia

SATRIA PIRANTI PERKASA

Nama Penanggung Jawab : [REDACTED]
 Jabatan Penanggung Jawab : DIREKTUR
 NPWP Penyedia : [REDACTED]
 Alamat Penyedia : Kawasan Industri MM2100, Jl. Selayar No.1
 Blok B2, Mekarwangi, Kec. Cikarang Bar.,
 Kabupaten Bekasi, Kab Bekasi, 17530

Ringkasan Pesanan Melalui Negosiasi

Nama Produk	Harga Produk	Jumlah
Jasa PDK TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2025 BULANAN 8,00 bulan Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KPWNMSW0J1DPS314R6HJ7YZ3&orderKey=13e534c8-8fb4-437c-808b-01a9d703ad94&productId=734e2535-2c2b-4244-9ae7-c1b51d54b769	Rp11.936.937,00	8,00
Jasa PDK TOYOTA INNOVA ZENIX 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2026 BULANAN 63,00 bulan Golongan PPN 12% https://katalog.inaproc.id/snapshot-prod-uct?orderId=01KPWNMSW0J1DPS314R6HJ7YZ3&orderKey=13e534c8-8fb4-437c-808b-01a9d703ad94&productId=45c3e52b-9e39-4654-8b70-0a811a798ea5	Rp11.936.936,00	63,00

Ringkasan Pembayaran

Keterangan	Harga
Total Transaksi Termasuk: Harga Produk	Rp847.522.464,00
Estimasi Total PPN Termasuk: Pajak Produk	Rp93.227.471,00
Estimasi Total Pembayaran	Rp940.749.935,00

Detail Penyelesaian Pekerjaan

Nama : Alid Tirtayasa (PPK) (6281385111567)
 Alamat : Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kebon Kelapa, Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 11840

 Catatan Alamat
 Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat

No. Surat Pesanan
Tanggal Surat Pesanan

: EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3
: 30 Apr 2026, 16:16:43 WIB

Tanggal Penyelesaian

: 31 Desember 2026 - 31 Desember 2026

🕒 **Catatan Tanggal Penyelesaian**

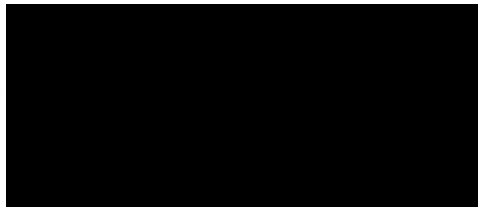
Unit sewa harus sesuai spesifikasi

Surat Pesanan ini berlaku sejak tanggal Surat Pesanan ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan. Demikian Surat Pesanan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak menggunakan sistem tanda tangan digital dalam 1 (satu) dokumen asli yang dapat digunakan kedua belah pihak, serta memiliki kekuatan hukum dan pembuktian yang sama untuk kedua belah pihak.

Dengan memberikan Tanda Tangan Elektronik pada Surat Pesanan ini, maka Pemesan dan Penyedia telah menyetujui **Syarat dan Ketentuan** pada <https://bantuan.inaproc.id/hc/id-id/articles/10157833668111-Syarat-dan-Ketentuan-Katalog-Elektronik-Versi-6-Versi-1-1> yang berlaku di Katalog Elektronik v6.

KOMISI PENYIARAN INDONESIA
Kementerian Komunikasi dan Digital

SATRIA PIRANTI PERKASA



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN untuk Pembeli dan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Privy untuk Penyedia. Untuk memastikan keasliannya, silakan unduh dokumen ini kemudian unggah pada <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

No. Klausul dalam SSKK	No. SSKK	Pengaturan dalam SSKK
1. Korespondensi	1.1	Alamat para pihak adalah sebagai berikut: Satuan Kerja Pejabat Penandatanganan Kontrak Nama : Komisi Penyiaran Indonesia Alamat : Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat Telepon : 021-22346444 Website : www.kpi.go.id Fax : 021-021-21203907 e-mail : layananpublik@kpi.go.id : cc.bagianumumkpi@gmail.com
	1.2	Penyedia Nama : PT. Satria Piranti Perkasa Alamat Cabang : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara Telepon : 021-50116028 Website : www.satriapiranti.co.id e-mail : sukilie@satriapiranti.com
2. Wakil sah para pihak	2.1	Untuk Pejabat penandatanganan Kontrak: Alid Tirtayasa (selaku Pejabat Pembuat Komitmen) Untuk Penyedia : Suki Lie (Direktur)
3. Jangka waktu pelaksanaan	3.1	Penyedia harus melaksanakan pekerjaan selama 214 (dua ratus empat belas) hari kalender untuk Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan Anggota KPI Pusat dan 245 (dua ratus empat puluh lima) hari kalender untuk Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris KPI Pusat
4. Lingkup Pekerjaan	4.1	Lingkup Pekerjaan adalah sebagai berikut:
	a.	Sewa kendaraan dinas jabatan bermotor roda empat dengan tipe Setara Sedan/Jeep/SUV 2.000 cc - 2.500 cc / 4 silinder warna putih sebanyak 9 (sembilan) unit untuk Anggota KPI Pusat selama 7 (tujuh) bulan (Juni s.d. Desember 2026) b. Sewa Kendaraan dinas jabatan bermotor roda empat dengan tipe Setara Sedan/Jeep/SUV 2.000 cc - 2.500 cc / 4 silinder warna putih sebanyak 1 (satu) unit untuk Sekretaris KPI Pusat selama 8 (delapan) bulan (Mei s.d. Desember 2026)
5. Harga	5.1	Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada Surat Pesanan (SP) ini.

- | | | |
|---------------------------------|------|--|
| | 5.2 | Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman saat semua unit pertama kali diterima dan biaya pengiriman saat pengembalian unit saat kontrak berakhir, biaya asuransi selama masa sewa, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual. |
| | 5.3 | Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga |
| 6. Perubahan Surat Pesanan (SP) | 6.1 | SP hanya dapat diubah melalui addendum SP; |
| | 6.2 | Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan masa langganan dalam kontrak atas permintaan Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. |
| 7. Perpanjangan waktu | | Pelaksanaan pekerjaan tidak diberikan perpanjangan waktu |
| 8. Serah Terima Pekerjaan | | Pekerjaan diserahkan ketika lingkup pekerjaan dan/atau unit sewa secara keseluruhan telah dilaksanakan |
| 9. Kepemilikan dokumen | | Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen yang dihasilkan dari pekerjaan ini |
| 10. Pembayaran | 10.1 | Kontrak pengadaan pekerjaan ini tidak diberikan uang muka |
| | 10.2 | Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara sekaligus |
| | 10.3 | Pembayaran diberikan apabila Penyedia telah melampirkan bukti tagih berupa kuitansi dan invoice dan kelengkapan lainnya seperti e-faktur (jika ada) |
| 11. Penyelesaian perselisihan | | Dalam hal terdapat sengketa antara Pejabat Penandatanganan Kontrak dengan Penyedia, penyelesaian sengketa akan dilakukan melalui layanan penyelesaian sengketa yang diselenggarakan oleh LKPP |

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

- | | |
|----------------------------|---|
| A Ketentuan Umum | Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut: |
| 1. Definisi | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (<i>skill/ware</i>) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang. 1.2 Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN / APBD. 1.3 Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD. 1.4 Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Pekerjaan Jasa Lainnya. 1.5 Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan. 1.6 Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada Institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. 1.7 Penyedia adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Pekerjaan Konstruksi. 1.8 Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan penye dia yang mencakup Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK) ini dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) serta dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak. 1.9 Nilai Kontrak adalah total harga yang tercantum dalam Kontrak. 1.10 Hari adalah hari kalender. 1.11 Harga Perkiraan Sendiri (HPS) adalah perhitungan perkiraan biaya pekerjaan yang disusun oleh PPK, dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta digunakan oleh Pokja ULP untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya. |
| 2. Bahasa dan Hukum | <ol style="list-style-type: none"> 2.1 Bahasa kontrak harus dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan Bahasa Indonesia dan bahasa nasional pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris. |

- 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia atau hukum yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung kesepakatan antara Pemerintah dan negara pemberi pinjaman/hibah).
3. **Larangan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan**
- Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa pemerintah, dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan
 - mendorong terjadinya persaingan tidak sehat;
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
4. **Korespondensi**
- Semua korespondensi dapat berbentuk surat, email dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak yang tercantum dalam SSKK. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah Para Pihak dalam SSUK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
5. **Wakil Sah Para Pihak**
- Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan, dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK. Khusus untuk penyedia perseorangan, Penyedia tidak boleh diwakilkan.
6. **Perpajakan**
- Penyedia, Subpenyedia (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
7. **Pengabaian**
- Jika terjadi pengabaian oleh satu Pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh Pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh Wakil Sah Pihak yang melakukan pengabaian.
- B. **Pelaksanaan dan Penyelesaian Kontrak**

- | | |
|---|--|
| 8. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan | <p>8.1 Kontrak ini berlaku efektif pada tanggal penandatanganan Surat Perjanjian oleh Para Pihak atau pada tanggal yang ditetapkan dalam SSKK.</p> <p>8.2 Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam Surat Perjanjian.</p> <p>8.3 Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK.</p> <p>8.4 Apabila penyedia berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal karena keadaan diluar pengendaliannya dan penyedia telah melaporkan kejadian tersebut kepada PPK, maka PPK dapat melakukan penjadwalan kembali pelaksanaan tugas penyedia dengan adendum kontrak.</p> |
| 9. Penyelesaian | <p>9.1 Penyelesaian sampai dengan 100% (seratus persen) dengan dituangkan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan.</p> |
| C. Penghentian Kontrak
10. Penghentian dan Pemutusan Kontrak | <p>Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
 Dalam hal kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai</p> |
| D. Hak dan Kewajiban Para Pihak
11. Hak dan Kewajiban Para Pihak | <p>11.1 PPK berkewajiban melakukan pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak</p> <p>11.2 Penyedia berkewajiban melakukan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan</p> <p>11.3 PPK berhak menolak pekerjaan dari Penyedia apabila tidak sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan, dan penyedia wajib mengganti pekerjaan yang dimaksud.</p> <p>11.4 Penyedia berhak menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak</p> |
| 12. Penggunaan Dokumen- Dokumen Kontrak dan Informasi | <p>Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi teknis dan/atau gambar-gambar, kecuali dengan ijin tertulis dari PPK.</p> |
| 13. Pembayaran Denda | <p>Penyedia berkewajiban untuk membayar sanksi finansial berupa Denda sebagai akibat wanprestasi atau cidera janji terhadap kewajiban-kewajiban penyedia dalam Kontrak ini. Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual penyedia.</p> |

**E. Pembayaran kepada
Penyedia**
14. Harga Kontrak

PPK membayar kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam kontrak sebesar harga kontrak. Harga kontrak telah memperhitungkan keuntungan, beban pajak dan biaya overhead serta biaya asuransi yang meliputi juga biaya keselamatan dan kesehatan kerja.

**F. Penyelesaian
Perselisihan**
**15. Penyelesaian
Perselisihan**

Para Pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

16. Itikad Baik

Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam kontrak. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

**KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE (TOR)
PENGADAAN BELANJA BARANG BERUPA SEWA KENDARAAN
DINAS JABATAN RODA 4 (EMPAT)
TAHUN ANGGARAN 2026**

A. Pendahuluan

Sebagaimana Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) Nomor S-11/MK.6/2025 tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan Tahun Anggaran 2026 pada Kementerian Komunikasi dan Digital yang telah disetujui Kementerian Keuangan. Pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dibutuhkan fasilitas sebagai penunjang sumber daya manusia dalam menjalankan operasional organisasi. Sehingga, dalam hal ini untuk mendukung terlaksananya tugas dan fungsi organisasi internal KPI untuk Tahun Anggaran 2026 dibutuhkan perencanaan pengadaan belanja modal sebagai dasar untuk pengadaan pada tahun anggaran berjalan yang rinciannya terlampir dalam Kerangka Acuan Kerja ini.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan pengadaan barang modal di lingkungan Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengacu pada dasar hukum yang berlaku, yakni, antara lain:

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
- Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-11/MK.6/2025 Tentang Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara Hasil Penelaahan Tahun Anggaran 2026 pada Kementerian Komunikasi dan Digital.

C. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari rencana pengadaan sewa untuk tahun anggaran 2026 antara lain:

- Sebagai acuan untuk pelaksanaan belanja barang berupa sewa kendaraan tahun anggaran berjalan;
- Menunjang fasilitas pelaksanaan tugas dan fungsi pimpinan di tahun berjalan;

Sementara itu, tujuan dari rencana pengadaan sewa untuk tahun anggaran 2026 antara lain:

1. Menunjang mobilitas kerja Pimpinan KPI Pusat yang terdiri atas 9 (sembilan) Komisioner dan 1 (satu) Sekretaris dalam pelaksanaan tugas koordinasi, pengawasan, rapat strategis, dan representasi kelembagaan.
2. Menyediakan kendaraan dinas yang memenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, serta mendukung citra kelembagaan KPI Pusat.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran negara melalui mekanisme sewa kendaraan dinas sebagai alternatif atas kepemilikan kendaraan.

4. Mengurangi beban pengelolaan aset tetap, termasuk biaya perawatan jangka panjang, depresiasi aset, dan pengelolaan administrasi kendaraan dinas.
5. Memberikan fleksibilitas dalam penyesuaian spesifikasi kendaraan sesuai kebutuhan jabatan, perkembangan teknologi kendaraan, serta kebijakan efisiensi dan ramah lingkungan.
6. Memastikan ketersediaan kendaraan yang laik operasi dengan dukungan perawatan, asuransi, dan layanan teknis dari penyedia jasa sewa, sehingga Pimpinan dapat berfokus pada pelaksanaan tugas strategis.
7. Mendukung penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam aspek efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.

D. Penerima Manfaat

Stakeholder yang dapat menerima manfaat atas pelaksanaan pengadaan sewa antara lain;

- Seluruh Staf Sekretariat KPI, selaku pihak pengguna yang menggunakan secara langsung untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan.

E. Rincian Kebutuhan Barang dan Justifikasi

Adapun untuk rincian kebutuhan barang yang direncanakan untuk tahun 2026 yaitu, sebagai berikut;

1. **Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat) sejumlah 10 (satu) unit** yang akan digunakan untuk kendaraan dinas sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi. Pengadaan sewa kendaraan bermotor roda 4 (empat) ini dilakukan guna menunjang kegiatan dan pekerjaan yang membutuhkan mobilitas tinggi.

Justifikasi

Alasan Pengadaan Sewa: Kebutuhan kendaraan dinas jabatan yang membutuhkan mobilitas tinggi dan telah berakhirnya masa kontrak pengadaan sewa kendaraan dinas jabatan tahun anggaran 2025.

F. Tempat Pengiriman

Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir,
 Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

G. Spesifikasi Teknis dan Contoh Barang

Adapun rincian spesifikasi pengadaan sewa yang direncanakan untuk dilakukan pengadaan pada tahun 2026, tabel dibawah merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138 Tahun 2024 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara, sebagai berikut;

Kualifikasi	Jenis	Spesifikasi
A	Sedan	3.500 cc, 6 Silinder
	<i>Sport Utility Vehicles (SUV)/</i>	3.500 cc, 6 Silinder
	<i>Multi Purpose Vehicles (MPV)</i>	
B	Sedan	2.500 cc, 4 Silinder
	SUV	3.000 cc, 6 Silinder
C	Sedan	2.000 cc, 4 Silinder
	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
D	SUV	2.500 cc, 4 Silinder
E	SUV	2.000 cc, 4 Silinder
F	MPV	2.000 cc Bensin atau 2.500 cc Diesel, 4 Silinder
G	MPV	1.500 cc, 4 Silinder
	Sepeda Motor	225 cc, 1 Silinder

Nama Barang	Tipe / Spesifikasi	Contoh Foto / Barang
Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	- SUV 2.500 cc, 4 silinder	

Spesifikasi di atas merupakan acuan dasar dan bukan merupakan standar baku, yang disusun berdasarkan pertimbangan ketersediaan barang di pasaran, perubahan harga, ketersediaan anggaran, penambahan spesifikasi dan/atau kebutuhan peralatan penunjang, dan lain sebagainya.

H. Anggaran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Kebutuhan anggaran atas pengadaan belaja modal disusun sudah termasuk (biaya pengiriman, instalasi dan konfigurasi, barang penunjang/tambahan, Pajak Pertambahan Nilai (11%). Adapun kebutuhan anggaran menggunakan DIPA KPI Pusat Tahun Anggaran 2026, rincian pengadaan sewa untuk tahun 2026 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah	Bulan	Sewa Per Unit	Nilai Total
1	Kendaraan Bermotor Roda 4 (empat)	10	12	13.250.000	1.590.000.000
Total					1.590.000.000

I. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja / *Term Of Reference* (TOR) ini kami susun untuk menjadi rujukan atau dasar pelaksanaan pengadaan sewa pada tahun 2026.

Jakarta, 15 Desember 2025



KOMISI PENYIARAN INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 | 021-222035002, Faks. 021-21203922 | 021-21203907

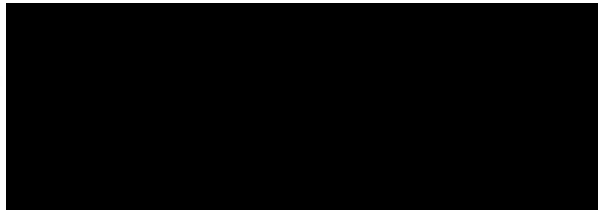
NOTA DINAS

Nomor : 1424/KPI/ RT.05.04/12/2025

Kepada Yth. : Sekretaris Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Dari : Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Fasilitas Kendaraan Tahun 2026
Tanggal : 23 Desember 2025

Sehubungan dengan adanya fasilitas kendaraan untuk Bapak Ubaidillah Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, maka dengan ini mohon Sekretaris KPI dapat memfasilitasi kendaraan TA 2026 menggunakan anggaran MAK 4492.EBA.994.002.C.522141.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KOMISI PENYIARAN INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 | 021-222035002, Faks. 021-21203922 | 021-21203907

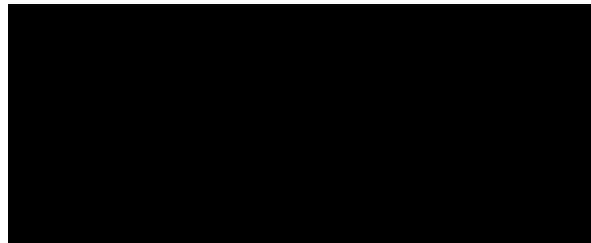
NOTA DINAS

Nomor : 201/PKSP/RT.05.04/12/2025

Kepada Yth. : Ketua KPI Pusat
Dari : Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat
Sifat : Biasa
Hal : Pengajuan Fasilitas Kendaraan Tahun 2026
Tanggal : 23 Desember 2025

Sehubungan dengan berakhirnya fasilitas kendaraan tahun 2025 atas nama **Bapak Mohamad Reza** (Wakil Ketua) Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dengan ini mohon dapat kembali di fasilitas kendaraan untuk tahun 2026 dengan menggunakan **MAK 4492.EBA.994.002.C.522141**.

Demikian ini disampaikan, atas perhatiannya dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 | 021-222035002, Faks. 021-21203922 | 021-21203907

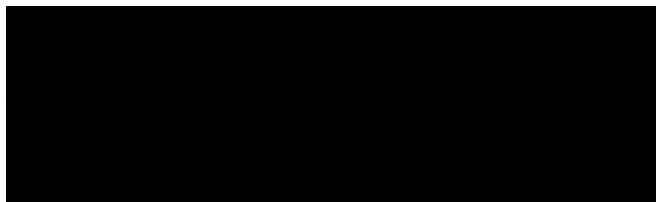
NOTA DINAS

Nomor : 187/PS/RT.05.04/12/2025

Kepada Yth. : Ketua KPI Pusat
Dari : Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Fasilitas Kendaraan Tahun 2026
Tanggal : 22 Desember 2025

Sehubungan dengan fasilitas kendaraan untuk Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dengan ini mohon difasilitasi sewa kendaraan untuk tahun 2026 atas nama Bapak **Tulus Santoso** dengan MAK 4492.EBA.994.002.C.522141.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.





KOMISI PENYIARAN INDONESIA
LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 | 021-222035002, Faks. 021-21203922 | 021-21203907

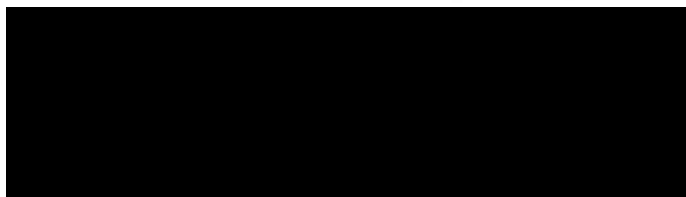
NOTA DINAS

Nomor : 188/PS/RT.05.04/12/2025

Kepada Yth. : Ketua KPI Pusat
Dari : Komisioner Koordinator Bidang Pengawasan Isi Siaran
Sifat : Segera
Hal : Permohonan Fasilitas Kendaraan Tahun 2026
Tanggal : 22 Desember 2025

Sehubungan dengan fasilitas kendaraan untuk Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dengan ini mohon difasilitasi sewa kendaraan untuk tahun 2026 atas nama Ibu Aliyah dengan MAK 4492.EBA.994.002.C.522141.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 | 021-222035002, Faks. 021-21203922 | 021-21203907

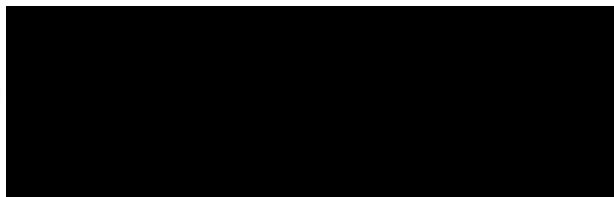
NOTA DINAS

Nomor : 200/PKSP/RT.05.04/12/2025

Kepada Yth. : Ketua KPI Pusat
Dari : Koordinator Bidang PKSP KPI Pusat
Sifat : Biasa
Hal : Pengajuan Fasilitas Kendaraan Tahun 2026
Tanggal : 22 Desember 2025

Sehubungan dengan fasilitas kendaraan untuk Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dengan ini mohon difasilitasi sewa kendaraan tahun 2026 a.n. Bapak Muhammad Hasrul Hasan dengan menggunakan MAK 4492.EBA.994.002.C.522141.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.





KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 • 021-222035002, Faks. 021-21203922 • 021-21203907

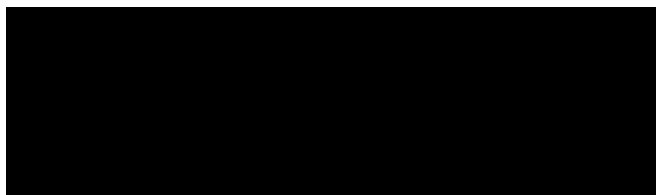
NOTA DINAS

Nomor: 362/KL/RT.05.04/12/2025

Kepada Yth. : Ketua KPI Pusat
Dari : Koord. Kelembagaan KPI Pusat
Sifat : Biasa
Hal : Pengajuan Fasilitas Kendaraan Tahun 2026
Tanggal : 22 Desember 2025

Sehubungan dengan fasilitas kendaraan untuk Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dengan ini mohon difasilitasi sewa kendaraan tahun 2026 atas nama Bapak I Made Sunarsa dengan MAK 4492.EBA.994.002.C.522141.

Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 || 021-222035002, Faks. 021-21203922 || 021-21203907

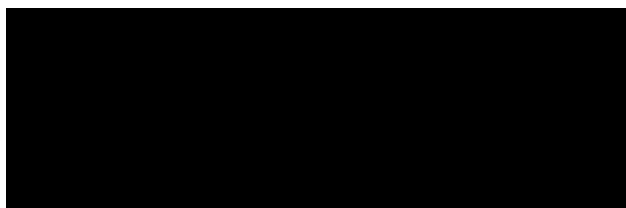
NOTA DINAS

Nomor : 364/KL/RT.05.04/12/2025

Kepada Yth. : Ketua KPI Pusat
Dari : Koordid Kelembagaan KPI Pusat
Sifat : Biasa
Hal : Pengajuan Fasilitasi Kendaraan tahun 2026
Tanggal : 22 Desember 2025

Sehubungan dengan fasilitas kendaraan untuk Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dengan ini mohon difasilitasi sewa kendaraan Tahun 2026 atas nama **Evri Rizqi Monarshi** menggunakan MAK 4492.EBA.994.002.C.522141.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya dan Kerjasama diucapkan terima kasih.





KOMISI PENYIARAN INDONESIA

LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 | 021-222035002, Faks. 021-21203922 | 021-21203907

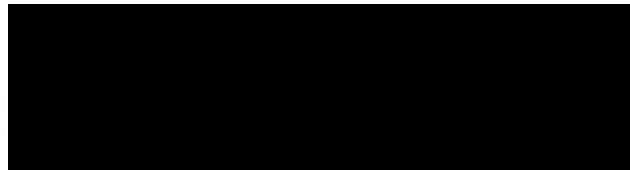
NOTA DINAS

Nomor : 368/KL/RT.05.04/12/2025

Kepada Yth. : Ketua KPI Pusat
Dari : Komisioner Koordinator Bidang Kelembagaan
Hal : Pengajuan Fasilitas Kendaraan Tahun 2026
Sifat : Biasa
Tanggal : 22 Desember 2025

Sehubungan dengan Fasilitas Kendaraan untuk Anggota Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, dengan ini mohon difasilitasi sewa Kendaraan tahun 2026 atas nama Bapak **Amin Shabana** dengan MAK 4492.EBA.994.002.C.522141.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.





KOMISI PENYIARAN INDONESIA LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN

Jl. Ir. H Juanda No. 36, Jakarta 10120 Telp. 021-22346444 || 021-222035002, Faks. 021-21203922 || 021-21203907

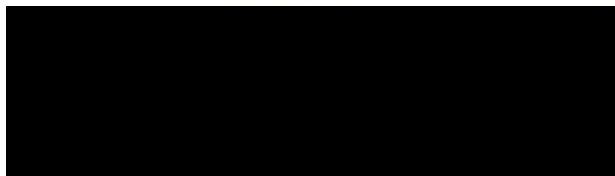
NOTA DINAS

Nomor: 366/KL/RT.05.04/12/2025

Kepada Yth. : Ketua KPI Pusat
Dari : Koorbid Kelembagaan KPI Pusat
Sifat : Biasa
Hal : Pengajuan Fasilitas Kendaraan Tahun 2026
Tanggal : 22 Desember 2025

Sehubungan dengan fasilitas kendaraan untuk Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dengan ini mohon difasilitasi sewa kendaraan tahun 2026 atas nama Ibu **Mimah Susanti** dengan MAK 4492.EBA.994.002.C.522141.

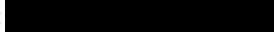
Demikian disampaikan, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terima kasih.



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 55/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/05/2026

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : 
NIP : 
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat kantor : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I).

II. Nama : 
Jabatan : Direktur
Alamat kantor : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330.

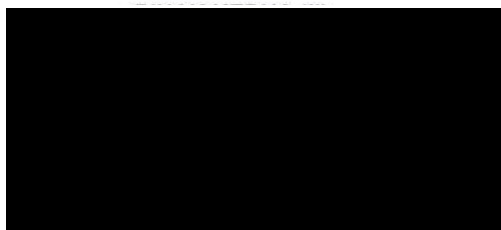
Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II).

PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang dan/atau menyepakati penyelesaian pekerjaan/jasa dari PIHAK PERTAMA sebagai berikut:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Masa sewa	Satuan	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah Harga
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026							
1	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2025 BULANAN	1	unit	8	Bulan	11,936,937	95,495,496
Jumlah sebelum pajak							95,495,496
PPN							10,504,505
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	Rp 106,000,001
seratus enam juta satu rupiah							

PIHAK PERTAMA menerima bahwa pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA dengan baik dan cukup satuan maupun jumlahnya sesuai dengan Surat Pesanan Nomor EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7Y23 tanggal 30 April 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.



Direktur





KOMDIGI

**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : 55/SETKPI.31/UP.01.04/BAST/05/2026

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Mei tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : [REDACTED]
NIP : [REDACTED]
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat kantor : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA (I)**.

- II. Nama : [REDACTED]
Jabatan : [REDACTED]
Alamat kantor : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA (II)**.

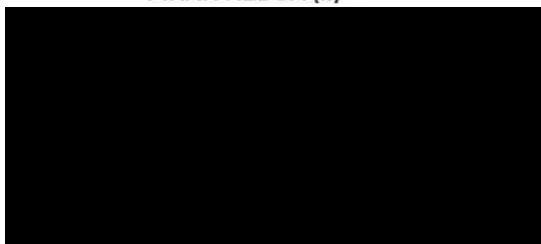
PIHAK KEDUA telah menyerahkan barang dan/atau menyepakati penyelesaian pekerjaan/jasa dari **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Masa sewa	Satuan	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah Harga
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026							
1	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2026 BULANAN	9	unit	7	Bulan	11,936,936	752,026,968
Jumlah sebelum pajak							752,026,968
PPN							82,722,966
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	Rp 834,749,934
delapan ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh empat rupiah							

PIHAK PERTAMA menerima bahwa pekerjaan tersebut telah diserahkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan baik dan cukup satuan maupun jumlahnya sesuai dengan Surat Pesanan Nomor 55/SETKPI.31/KU.01.09/SP/04/2026 tanggal 30 April 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)



PIHAK PERTAMA (I)



SEKRETARIAT KPI PU



KOMDIGI

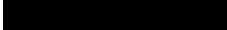
**KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL RI
SEKRETARIAT JENDERAL
SEKRETARIAT KOMISI PENYIARAN INDONESIA PUSAT**

Jl. Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120, Telp. (021) 22346444, www.kpi.go.id

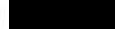
BERITA ACARA PENYELESAIAN PEKERJAAN

Nomor : 55/SETKPI.31/UP.01.04/BAPP/12/2026

Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : 
NIP : 
Alamat : Pejabat Pembuat Komitmen
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No.36, RT.7/RW.2, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10120.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama Komisi Penyiaran Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I).

II. Nama : 
Jabatan : 
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330.

Dalam hal ini berwenang bertindak untuk dan atas nama PT. Satria Piranti Perkasa, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II).

PIHAK KEDUA (II) telah menyelesaikan pekerjaan dari PIHAK PERTAMA (I) sebagai berikut:

No	Nama Produk	Jumlah	Satuan	Masa sewa	Satuan	Harga Satuan Sebelum Pajak (Rp.)	Jumlah Harga
Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026							
1	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2026 BULANAN	9	unit	7	Bulan	11,936,936	752,026,968
2	Toyota Innova Zenix 2.0 V CVT HYBRID MODELISTA VIN 2025 BULANAN	1	unit	8	Bulan	11,936,937	95,495,496
Jumlah sebelum pajak							847,522,464
PPN							93,227,471
Terbilang (Sudah Termasuk Pajak)						Total	Rp 940,749,935
sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah							

PIHAK PERTAMA (I) menyatakan bahwa barang dan/atau pekerjaan tersebut telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA (II) dengan baik dan cukup satuan maupun jumlahnya sesuai dengan Surat Pesanan Nomor EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3 tanggal 30 April 2026.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap secukupnya untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK KEDUA (II)



PIHAK PERTAMA (I)



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA (SPTB)

No: 55/SETKPI.31/UP.01.04/SPTB/PPK/05/2026

1. Nama satuan kerja : Komisi Penyiaran Indonesia
2. Kode satuan kerja : 664323
3. Tanggal/nomor DIPA : SP DIPA-059.01.1.664323/2026 tanggal 1 Desember 2025
4. Sub kegiatan/MAK : 4492.EBA.994.002.C.522141
5. Klasifikasi belanja : Jasa Lainnya

Yang bertanda tangan di bawah ini atas nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia menyatakan bahwa saya bertanggung jawab penuh atas segala pengeluaran yang dibayarkan kepada yang berhak menerima dengan perincian sebagai berikut:

No	Akun	Penerima	Uraian	Jumlah
1.	522141	PT. Satria Piranti Perkasa	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026	Rp940.749.935,-
Jumlah				Rp940.749.935,-

Bukti-bukti tersebut di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku pada Satuan Kerja Komisi Penyiaran Indonesia untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.



Jakarta, 27 Mei 2026
Pejabat Pembuat Komitmen





SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : 
Jabatan : 
Bertindak untuk dan atas nama : PT. Satria Piranti Perkasa
Nama Perusahaan : PT. Satria Piranti Perkasa
Alamat : Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011,
Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14330.

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia sebesar Rp940.749.935,00 (sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan SPK/Perjanjian/Kontrak:

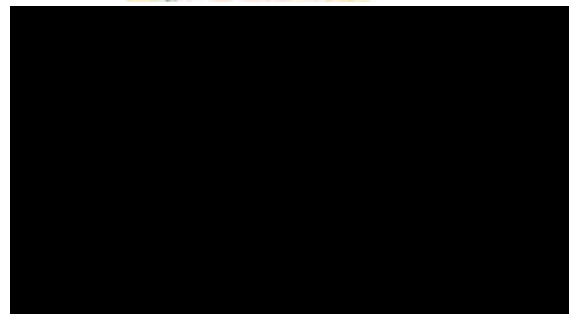
Tanggal : 30 April 2026
Nomor : EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3
Pekerjaan : Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk
Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026
dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d.
Desember 2026

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Mei 2026
Direktur PT. Satria Piranti Perkasa







SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENYEDIA BARANG/JASA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	[REDACTED]
Jabatan	:	[REDACTED]
Bertindak untuk dan atas nama	:	PT. Satria Piranti Perkasa
Nama Perusahaan	:	PT. Satria Piranti Perkasa
Alamat	:	Jl. Yos Sudarso Kav. 48 Blok. E 7 RT. 009 / RW. 011, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14330.

Sehubungan dengan pembayaran yang diterima dari Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia sebesar Rp940.749.935,00 (sembilan ratus empat puluh juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah) berdasarkan SPK/Perjanjian/Kontrak:

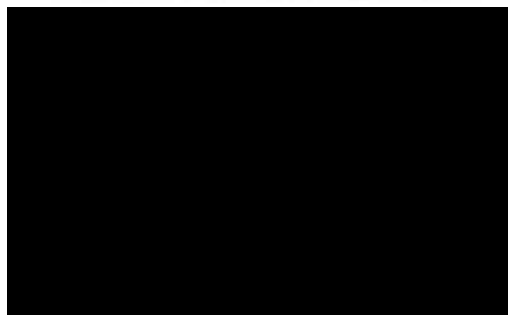
Tanggal	:	30 April 2026
Nomor	:	EP-01KPWNM5W0J1DPS314R6HJ7YZ3
Pekerjaan	:	Pengadaan Sewa Kendaraan Dinas Jabatan untuk Sekretaris KPI Pusat bulan Mei s.d. Desember 2026 dan Komisioner KPI Pusat untuk bulan Juni s.d. Desember 2026

Dengan ini menyatakan bahwa Saya bertanggung jawab penuh untuk menyelesaikan prestasi pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas.

Apabila sampai dengan masa penyelesaian pekerjaan sebagaimana diatur dalam SPK/Perjanjian/Kontrak tersebut di atas saya lalai/cidera janji/wanprestasi dan/atau terjadi pemutusan kontrak, saya bersedia untuk mengembalikan/menyetorkan kembali uang ke kas negara sebesar nilai sisa pekerjaan yang belum ada prestasinya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 25 Mei 2026
Direktur PT. Satria Piranti Perkasa



INVOICE

Customer :

 KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
JL. GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

 Invoice No. : 00009498/SPPN/2026
 Date : 25-May-2026
 PO No. : -
 Ref No. : -
 Currency : IDR
 Page : 1 of 2

Qty	Description	Unit Price	Total
Biaya Pemakaian :			
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0884. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026.	83,558,552,00	83,558,552,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0885. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026.	83,558,552,00	83,558,552,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0886. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026.	83,558,552,00	83,558,552,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0887. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026.	83,558,552,00	83,558,552,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0888. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026.	83,558,552,00	83,558,552,00

CAL: C8B8CJIA; 3000 SC; KN: C0888; Bellong: NJ-Jnu-
Tlbe: KPAVC INIGAV XEIX S'O A HA WODEGISA
Location: Japodeispek' Name: cal' Meix: TOXOIA'

93'229'225'00

CAL' Cabschyl: 3000 cc' KPI: C0881' Bexodre: 04-700-
Type: KIPANE IMMOVA SENIX 3'0 A HA MODENSTA
Location: "apocofeppek" Mame: cal' Wely: TOYCAIV'

83'228'225'00

CALL: CASH: 5000 CC: KN: CASH: BENCH: 01-11-
TYPE: KIPING IMMOV SEIX 50 A HA MODEPSTA
Location: Japocetepak' Name: CAL' MEIX: 10001A'

93'228'225'00

СЛ: С980С14: 3000 СС: КН: С0888' БЧ0000: 01-Гру-
Т100: КН1000 ИИ000А ЗЕМ1Х 5'0 А НА МОДЕП12А
Г0СВ1000: 120000000000' И1000: СЛ: И1000: 100000000000'

83'228'225'00

СЛУ: СРБСЛД: 5000 СС: КД: С0884* БЕНОВЕ: 01-ЈУН-
 ТИПЕ: КПАМС ИИОЛВ СЕМХ 5'0 А НА МОДЕЛСТА
 ГОСАРИО: 'БЕРОДЕБРЕК' МАМЕ. СЛ: МЕТК: ТОЛОЛВ'

83'228'225'00

NO	DESCRIPTION	AMOUNT	CY
1		Base	: 1 of 5
		Currency	: IDR
		Ref No	: -
		PO No	: -
		Date	: 30-May-2020
		Invoice No	: 000001881266V15050

LE. GAYAH MADA NO. 8 BETOTO UTARA GAMBIR
KONISI BERNILAIAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Abstract

B98C : 1 of 5
 Currency : IDR
 B91 MO' : -
 B0 MO' : -
 Date : 32-MAY-2020
 Invoice No' : 000084881266V15050

ИЛДИСЕ

INTERVIEW

[illegible]



**SATRIA
PIRANTI
PERKASA**

PT. SATRIA PIRANTI PERKASA

• **Legal Address** : Jl. Yos Sudarso Kav. 48, Blok E7, Sungai Bambu, Tanjung Priok, Jakarta Utara DKI Jakarta 14330

• **Correspondence Address** : Kawasan Industri MM2100
Jl. Selayar Blok B2-1 Cikarang Barat 17530

(021) 5011 6028 <https://satriapiranti.co.id>

INVOICE

Customer :

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
JL. GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

Invoice No. : 00009498/SPP/V/2026
Date : 25-May-2026
PO No. : -
Ref No. : -
Currency : IDR
Page : 2 of 2

Qty	Description	Unit Price	Total
	Biaya Pemakaian :		
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0889. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026.	83,558,552,00	83,558,552,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0890. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026.	83,558,552,00	83,558,552,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0891. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026.	83,558,552,00	83,558,552,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0892. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026	83,558,552,00	83,558,552,00
1	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, S/N: MHFABAAA7S0046248, KU: C1974. Periode: 01-Mei-2026 - 31-Dec-2026.	95,495,496,00	95,495,496,00

Note : -

Regards,

Sub Total : 847,522,464,00
Down Payment : 0,00
Discount : 0,00
DPP : 776.895,592,00
VAT : 93,227,471,00
TOTAL AMOUNT : 940,749,935,00

Account
BANKA

ATKAKA

PT. SATRIA BIRANTI PERKASA

Bedang

TOTAL AMOUNT	00.228.225.00
TAX	00.174.122.00
DPD	00.228.225.00
Discount	00.00
Down Payment	00.00
Net Total due	00.228.225.00

Note

KD: C1014 Periode: 01-Mei-2018 - 31-Dec-2018
 C/L: Categori: 3000 cc, SW: WHLAVAA120042348,
 Type: KIRANG INIOLV ZEIX 5.0 A HA WODEPSTA
 Location: Jember, Name: sat, Mark: TOYOTA
 2018 - 31-Dec-2018
 C/L: Categori: 3000 cc, KD: C0885 Periode: 01-Jan-
 Type: KIRANG INIOLV ZEIX 5.0 A HA WODEPSTA
 Location: Jember, Name: sat, Mark: TOYOTA
 2018 - 31-Dec-2018
 C/L: Categori: 3000 cc, KD: C0881 Periode: 01-Jan-
 Type: KIRANG INIOLV ZEIX 5.0 A HA WODEPSTA
 Location: Jember, Name: sat, Mark: TOYOTA
 2018 - 31-Dec-2018
 C/L: Categori: 3000 cc, KD: C0880 Periode: 01-Jan-
 Type: KIRANG INIOLV ZEIX 5.0 A HA WODEPSTA
 Location: Jember, Name: sat, Mark: TOYOTA
 2018 - 31-Dec-2018
 C/L: Categori: 3000 cc, KD: C0888 Periode: 01-Jan-
 Type: KIRANG INIOLV ZEIX 5.0 A HA WODEPSTA
 Location: Jember, Name: sat, Mark: TOYOTA
 Biga Perseksi:

00.228.225.00	00.228.225.00
00.228.225.00	00.228.225.00
00.228.225.00	00.228.225.00
00.228.225.00	00.228.225.00
00.228.225.00	00.228.225.00

Qty	Description	Unit Price	Total
-----	-------------	------------	-------

PT. SATRIA BIRANTI PERKASA
 KOMISI BEKAS INDIONESIA SEKRETARIAT JENDERAL
 Customer:

Page : 5 of 5
 Currency : IDR
 Ref No. : -
 PO No. : -
 Date : 2018-01-25
 Invoice No. : 00000000000000000000

INVOICE



PT. SATRIA BIRANTI PERKASA
 Jl. Raya Jember - Surabaya
 Telp. (031) 800.0000
 Fax. (031) 800.0000
 Email: info@satriabiranti.co.id
 Website: www.satriabiranti.co.id



KWITANSI

No. 00287/SPP-JKT/V/2026

Sudah Terima Dari : KOMISI PENYIARAN INDONESIA

Banyaknya Uang :

**Sembilan Ratus Empat Puluh Juta Tujuh Ratus Empat
Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima
Rupiah**

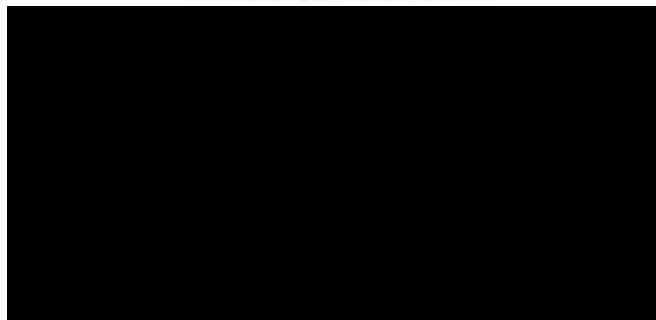
Untuk Pembayaran : Sewa atas Invoice 00009498/SPP/V/2026 Periode 01 Mei – 31
Desember 2026 dan 01 Juni 2026 – 31 Desember 2026.

Rp 940.749.935,-

Mohon pembayaran ditransfer ke rekening dibawah ini:

- Nama : PT. Satria Piranti Perkasa
- No. Rekening : 486-0168567
- Bank : BCA
- Cabang : MM 2100

Jakarta, 25 Mei 2026



Faktur Pajak

Nama: SATRIA PIRANTI PERKASA
Alamat: JL. YOS SUDARSO KAV. 48 E 7 , KOTA
ADM. JAKARTA UTARA #0018048601048000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SATRIA PIRANTI PERKASA
Alamat : JL. YOS SUDARSO KAV. 48 E 7 , RT 009, RW 011, SUNGAI BAMBU, TANJUNG PRIOK, KOTA ADM.
JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA 14330
NPWP

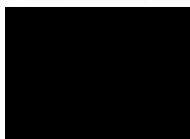
Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN DIGITAL
Alamat : JL GAJAH MADA NO.8, RT 000, RW 000, PETOJO UTARA, GAMBIR, KOTA ADM. JAKARTA PUSAT, DKI
JAKARTA 10130 #00011855780290000000000
NPWP
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email : -

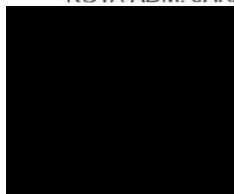
No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0884. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026. Rp 83.558.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	83.558.552,00
2	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0885. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026. Rp 83.558.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	83.558.552,00
3	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0886. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026. Rp 83.558.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	83.558.552,00
4	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0887. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026. Rp 83.558.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	83.558.552,00
5	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0888. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026. Rp 83.558.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	83.558.552,00
6	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0889. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026. Rp 83.558.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	83.558.552,00

7	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0890. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026. Rp 83.558.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	83.558.552,00
8	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0891. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026. Rp 83.558.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	83.558.552,00
9	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, KU: C0892. Periode: 01-Jun-2026 - 31-Dec-2026 Rp 83.558.552,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	83.558.552,00
10	130101	Location: Jabodetabek, Name: car, Merk: TOYOTA, Type: KIJANG INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT, Capacity: 2000 cc, S/N: MHFABAAA7S0046248, KU: C1974. Periode: 01-Mei-2026 - 31-Dec-2026. Rp 95.495.496,00 x 1,00 Lainnya Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	95.495.496,00
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			847.522.464,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			776.895.592,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			93.227.471,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA UTARA, 25 Mei 2026



car elektronik

(Referensi: 00009498/SPP/V/2026)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak

1

NPWP :

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok

NAMA WP :

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

ALAMAT WP :

JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP :

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPN , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2026

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 93,227,471

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA

Tanggal

2026

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP

Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok

NAMA WP

ALAMAT WP

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP

Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPN , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

2 0 2 6

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Dilisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

: Rp 93,227,471

Dilisi dengan rupiah penuh

Terbilang : Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

IAKARTA 1 Tanggal

2026

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR
Untuk Dilaporkan oleh Wajib
Pajak ke KPP

3

NPWP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

ALAMAT WP

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPN , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2026

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

: Rp 93,227,471

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA

Tanggal

2026

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

**SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)**

LEMBAR
Untuk Bank Persepsi/Kantor
Pos & Giro

4

NPWP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok

NAMA WP

ALAMAT WP

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPN , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2 0 2 6

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Rp 93,227,471

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA , Tanggal

2026

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR

Untuk Arsip Wajib Pungut
atau Pihak Lain

5

NPWP

:

Dilisi sesuai dengan Nomor Pajak

NAMA WP

:

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

ALAMAT WP

:

JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP

:

Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

:

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPN , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Tahun Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

2 0 2 6

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Dilisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

:

Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

:

Rp 93,227,471

Dilisi dengan rupiah penuh

Terbilang :

Sembilan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA , Tanggal

2026

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "

Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pajak

1

NPWP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok

NAMA WP

ALAMAT WP

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPH 23 , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2026

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 16,950,449

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang: Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA

Tanggal

2026

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR
Untuk KPPN

2

NPWP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak wajib pajak yang bersangkutan

NAMA WP

ALAMAT WP

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPH 23 , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2026

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

Rp 16,950,449

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang: Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA , Tanggal

2026

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR
Untuk Dilaporkan oleh Wajib
Pajak ke KPP

3

NPWP :

Disi sesuai dengan Nomor Pokok wajib pajak yang umum

NAMA WP : KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

ALAMAT WP : JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP :

Disi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPH 23 , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Tahun Pajak

2026

Disi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Disi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran : Rp 16,950,449

Disi dengan rupiah penuh

Terbilang: Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA , Tanggal

2026

Name Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR
Untuk Bank Persepsi/Kantor
Pos & Giro

4

NPWP :

Dilisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang bersangkutan

NAMA WP :

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

ALAMAT WP :

JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP :

Dilisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP :

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPH 23 , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2026

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Dilisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan :

Dilisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran :

Rp 16,950,449

Dilisi dengan rupiah penuh

Terbilang: Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA , Tanggal

2026

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT SETORAN PAJAK (SSP)

LEMBAR
Untuk Arsip Wajib Pungut
atau Pihak Lain

5

NPWP

Diisi sesuai dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

NAMA WP

ALAMAT WP

KOMISI PENYIARAN INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN

JL GAJAH MADA NO. 8 PETOJO UTARA GAMBIR

NOP

Diisi sesuai dengan Nomor Objek Pajak

ALAMAT OP

Kode Akun Pajak

Kode Jenis Setoran

Uraian Pembayaran :

PPH 23 , Sewa Kendaraan

Masa Pajak

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des

Tahun Pajak

2026

Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan

Diisi Tahun terutangnya Pajak

Nomor Ketetapan

Diisi sesuai Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Jumlah Pembayaran

: Rp 16,950,449

Diisi dengan rupiah penuh

Terbilang: Enam Belas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Sembilan Rupiah

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cop dan tanda tangan

Wajib Pajak/Penyetor

JAKARTA , Tanggal

2026

Nama Jelas :

" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran